

**ANALISIS KINERJA TERHADAP PENGAWASAN WARGA NEGARA
ASING
(Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh

**VIRGIAWAN ARBI PRATAMA
NPM. 2116021039**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**ANALISIS KINERJA TERHADAP PENGAWASAN WARGA NEGARA
ASING
(Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung)**

Oleh

VIRGIAWAN ARBI PRATAMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA TERHADAP PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung)

Oleh

VIRGIAWAN ARBI PRATAMA

Mobilitas penduduk antarnegara sebagai dampak globalisasi telah meningkatkan jumlah Warga Negara Asing (WNA) di Kota Bandar Lampung sebagai pintu gerbang strategis Sumatera. Fenomena ini menuntut peran aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menjaga stabilitas wilayah melalui pengawasan yang terintegrasi guna memitigasi potensi gangguan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Kesbangpol Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pengawasan WNA melalui tinjauan mekanisme monitoring, pelaporan, dan tata kelola kolaboratif..

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber. Analisis kinerja berlandaskan teori pengukuran kinerja publik Mahsun (2006) yang mencakup empat dimensi utama: input, process, output, dan outcome.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kesbangpol berada pada level *compliance performance*. Pada dimensi proses, instansi telah menerapkan strategi *Dual-Track Monitoring* dan *Networked Governance* melalui peran perguruan tinggi sebagai penyangga administratif. Namun, efektivitas sistemik masih terhambat oleh pola koordinasi yang bersifat *meeting-centric*, latensi informasi, serta fragmentasi data digital antara inovasi *Intelligence-Led Surveillance* (Lini AI dan APOA V.2) dengan sistem pelaporan manual daerah. Kondisi tersebut memicu fenomena *Silent Agency* dan bias pelaporan *Police-Centric* di masyarakat akibat strategi sosialisasi yang elitis. Dampak pengawasan terbukti baru menyentuh dimensi ketertiban administratif, belum pada kesadaran hukum substantif. Pemerintah daerah disarankan melakukan integrasi *shared database* lintas instansi, penguatan spesialisasi SDM analis, serta rekonstruksi strategi sosialisasi berbasis komunitas urban yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Kinerja, Pengawasan, Warga Negara Asing, Kesbangpol, Teori Pengukuran Kinerja.

ABSTRACT

PERFORMANCE ANALYSIS OF THE SUPERVISION OF FOREIGN NATIONALS

(A Study at the National Unity and Political Agency of Bandar Lampung City)

By

VIRGIAWAN ARBI PRATAMA

Transnational population mobility, as a consequence of globalization, has significantly increased the number of foreign nationals (WNA) in Bandar Lampung, a strategic gateway to Sumatra. This phenomenon demands an active role from the National and Political Unity Agency (Kesbangpol) in maintaining regional stability through integrated surveillance to mitigate potential security disruptions. This study aims to analyze the performance of the Bandar Lampung Kesbangpol in monitoring foreign nationals through a review of monitoring mechanisms, reporting, and collaborative governance. This study uses a descriptive qualitative method. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing through source triangulation. The performance analysis refers to the performance measurement theory consisting of four indicators: input, process, output, and outcome. The results indicate that Kesbangpol's performance is currently at the compliance performance level. In the process dimension, the agency has implemented Dual-Track Monitoring and Networked Governance strategies, utilizing universities as administrative buffers. However, systemic effectiveness is still hindered by meeting-centric coordination patterns, information latency, and digital data fragmentation between Intelligence-Led Surveillance innovations (Lini AI and APOA V.2) and manual regional reporting systems. These conditions have triggered a "Silent Agency" phenomenon and "Police-Centric" reporting bias within the community due to elitist socialization strategies. The impact of surveillance is proven to only reach the dimension of administrative compliance, rather than substantive legal awareness. It is recommended that the local government implement inter-agency shared database integration, strengthen the specialization of human resource analysts, and reconstruct socialization strategies based on collaborative and sustainable urban community engagement.

Keywords : Performance, Supervision, Foreign Nationals, Kesbangpol, Performance Measurement Theory

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ANALISIS KINERJA TERHADAP
PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING
(Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Virgiawan Arbi Pratama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021039**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Arizka Warganegara., S.IP., M.A., Ph. D.
NIP. 198106202006041003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

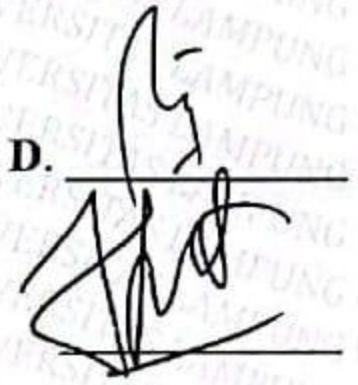
Dr. Tabah Maryanth, S.IP., M.Si
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Arizka Warganegara.,S.IP.,M.A.,Ph. D.**

Penguji Utama : **Himawan Indraijat ,S.IP., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal lulus ujian skripsi : 23 Januari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Virgiawan Arbi Pratama
NPM. 2116021039

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Virgiawan Arbi Pratama, lahir di Pringsewu, 26 Juni 2002. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 1 Pringsewu Barat, yang ditempuh sejak tahun 2009 hingga 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 3 Pringsewu dari tahun 2014 hingga 2017. Pendidikan menengah atas dijalani di SMAN 2 Pringsewu, dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, pada periode 2017 hingga 2020.

Saat ini, penulis merupakan mahasiswa aktif di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2021. Selama menjalani masa studi, penulis memiliki minat khusus pada isu-isu seputar Kebijakan Publik, Komunikasi Politik, Tata Kelola Manajemen SDM Pemerintahan, dan Teknologi Informasi Pemerintahan. Hingga saat penyusunan skripsi ini.

Selain aktif dalam kegiatan akademik, penulis juga mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan keterampilan kewirausahaan dan digital marketing, penulis juga mengikuti Pelatihan Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh CCED Universitas Lampung pada Juli 2024. Pelatihan ini memberikan pengetahuan mengenai strategi pemasaran digital, penggunaan Google Trends dan Meta Business, serta optimalisasi media sosial untuk promosi usaha. Demikian Daftar Riwayat Hidup ini disusun sebagai bagian

MOTTO

“Integrity is the only law worth following”

(Virgiawan Arbi Pratama)



Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan tulisan sederhana ini teruntuk ...

Ibu dan Bapak tercinta

Yang tak henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa demi keberlangsungan Anakmu menjalani hidup, beribu terimakasih tak dapat membalas semua jasamu demi membesarkan seonggok daging ini menjadi insan yang berguna.

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur Peneliti haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Kinerja Terhadap Pengawasan Warga Negara Asing (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung)**

”. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Peneliti melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum;
5. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Kepada Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph. D. , selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih, Prof, atas bimbingan yang tidak sekadar memberikan arahan teknis, namun juga memberikan keteladanan dalam berpikir dan bersikap. Dedikasi dan kesabaran Prof dalam mengawal proses ini telah membuka cakrawala berpikir penulis menjadi lebih luas. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, rezeki, serta perlindungan-Nya atas segala dedikasi yang Prof berikan.
7. Kepada Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si, selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas ketegasan dan pemikiran kritis yang Bapak berikan. Lewat setiap koreksi, penulis belajar bahwa kualitas bukan hanya soal menyusun teori, melainkan tentang menjaga integritas dan kedalaman substansi ilmu. Kehadiran Bapak adalah pengingat bahwa keilmuan harus dipertanggungjawabkan dengan presisi.
8. Untuk Ibunda tercinta, Ibu Novi Rosita, muara dari segala doa dan kekuatan penulis. Terima kasih telah mengajarkan makna ketangguhan melalui ketulusan yang tak pernah habis. Setiap pencapaian dalam skripsi ini adalah hasil dari doa-doa sunyi Ibu di sepertiga malam. Terima kasih telah menjadi pelabuhan paling tenang di tengah badai, dan tidak pernah menyerah pada proses anakmu ini
9. Untuk Bapak tercinta, Bapak Lucky Gunawan, sosok pilar dan teladan utama bagi penulis. Terima kasih, Yah, atas setiap keringat dan didikan keras yang membentuk penulis menjadi laki-laki yang berani berdiri tegak menghadapi tantangan. Skripsi ini adalah bakti kecil penulis atas segala pundak yang telah Ayah pinjamkan demi masa depan anakmu. Semoga ini menjadi kebanggaan yang setimpal bagi Ayah.
10. Untuk Rekan-Rekan Seperjuangan, yang tak dapat penulis sebutkan satu per

satu namun namanya terukir dalam memori perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi saudara di perkuliahan. Di tengah riuh rendahnya tawa dan kerasnya diskusi, kalian adalah alasan mengapa perjalanan berat ini terasa lebih ringan. Solidaritas kita adalah bukti bahwa keberhasilan tidak pernah diraih sendirian.

11. Untuk keluarga besar Mbah Sarno, yang senantiasa memberikan kehangatan dan dukungan tanpa pamrih. Terima kasih telah menjadi tempat bernaung yang selalu terbuka, mengingatkan penulis bahwa sejauh mana pun melangkah, keluarga adalah akar yang menguatkan.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2026

Peneliti

Virgiawan Arbi Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Tentang Kinerja.....	12
2.2 Tinjauan Tentang Organisasi.....	13
2.2.1 Pengertian Organisasi	13
2.2.2 Jenis-jenis Organisasi	13
2.3 Tinjauan Tentang Kinerja Organisasi.....	16
2.3.1 Pengertian Kinerja Organisasi	16
2.3.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi	17
2.3.3 Pengukuran Kinerja Organisasi	18
2.3.4 Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi.....	19
2.4 Tinjauan Tentang Pengawasan	21
2.4.1 Pengertian Pengawasan.....	21
2.4.2 Tujuan Pengawasan	22
2.4.3 Jenis-jenis Pengawasan.....	23
2.4.4 Karakteristik Pengawasan Yang Efektif	25
2.5 Tinjauan Tentang Orang Asing	25
2.5.1 Pengertian Orang Asing.....	25
2.5.2 Hak Orang Asing di Indonesia.....	26

2.5.3 Kewajiban Orang Asing Di Indonesia	27
2.6 Tinjauan Tentang Pengawasan Warga Negara Asing	28
2.7 Kerangka Berpikir	29
III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian	31
3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.4.1 Jenis Data	33
3.4.2 Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	37
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum	41
4.1.1 Sejarah Badan Kebangpol Kota Bandar Lampung	41
4.1.2 Visi dan Misi Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung.....	42
4.1.3 Struktur Organisasi	45
4.2 Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung dalam Melakukan Pengawasan Terhadap WNA.....	46
4.2.1 Ketersediaan Sumber Daya Dalam Pengawasan WNA.....	46
4.2.2 Proses Pelaksanaan Pengawasan WNA	57
4.2.3 Hasil Dan Capaian Pengawasan WNA	68
4.2.4 Dampak Pengawasan WNA Terhadap Ketertiban dan Keamanan Daerah.....	78
4.3 Analisis Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap WNA	90
4.3.1 Aspek Input (Ketersediaan Sumber Daya Dalam Pengawasan WNA) .	91
4.3.2 Aspek Proses (Proses Pelaksanaan Pengawasan WNA).....	94
4.3.3 Aspek Output (Hasil dan Capaian Pengawasan WNA).....	98
4.3.4 Aspek Outcome (Dampak Pengawasan WNA Terhadap Ketertiban dan Keamanan Daerah)	100
4.4 Rekomendasi Kebijakan.....	103

V. KESIMPULAN DAN SARAN	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1. Data Warga Negara Asing	4
Tabel 2. 1. Indikator Pengukuran Kinerja.....	21
Tabel 3. 1. Informan Penelitian.....	35
Tabel 4. 1. Triangulasi Hasil Penelitian Pada Indikator Input (Sumber Daya Dan Dukungan).....	53
Tabel 4. 2. Triangulasi Hasil Penelitian Pada Indikator Proses (Pelaksanaan Dan Mekanisme Kerja).....	66
Tabel 4. 3. Triangulasi Hasil Penelitian Pada Indikator Output (Hasil Dan Capaian Pengawasan WNA)	76
Tabel 4. 4. Triangulasi Hasil Penelitian Pada Indikator Outcome (Dampak dan manfaat).....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	30
Gambar 4. 1 Stuktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung	45
Gambar 4. 2 Rapat Koordinasi Tim PORA	58
Gambar 4. 3 Sinergitas Kolaborasi Antar Instansi.....	69
Gambar 4. 4 Operasi Gabungan Penindakan Keimigrasian.....	71

DAFTAR SINGKATAN

BVK	: Bebas Visa Kunjungan
ITAS	: Izin Tinggal Terbatas
KESBANGPOL	: Kesatuan Bangsa Dan Politik
KITAS	: Kartu Izin Tinggal Terbatas
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PORA	: Pengawasan Orang Asing
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RAKOR	: Rapat Koordinasi
RT	: Rukun Tetangga
RUDENIM	: Rumah Detensi Imigrasi
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TPI	: Tempat Pemeriksaan Imigrasi
UU	: Undang Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mobilitas penduduk antarnegara yang semakin tinggi merupakan salah satu dampak dari era globalisasi. Perkembangan ini menjadikan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di suatu wilayah bukan lagi hal yang asing, termasuk di Indonesia. Kedatangan WNA membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif, sehingga perlu adanya sistem pengawasan yang baik dari pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan, sosial, dan ekonomi. Di era keterbukaan ini, keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di suatu wilayah menjadi hal yang lumrah, baik untuk tujuan pariwisata, pendidikan, pekerjaan, maupun investasi. Fenomena ini membawa dampak positif seperti peningkatan ekonomi dan kerja sama internasional, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan jika tidak diawasi dengan baik.(Nujuliyani dkk., 2023)

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan di Lampung juga tidak terlepas dari fenomena meningkatnya mobilitas WNA. Dengan posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, kota ini menjadi salah satu daerah yang turut menerima kedatangan warga negara asing, baik dalam rangka wisata, pendidikan, maupun pekerjaan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan wilayah terhadap WNA dan kebutuhan akan pengawasan administratif untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum.

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 68 Tahun 2021 Pasal 11 ayat (2) Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian Badan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pada ayat (3) dijelaskan bahwa Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Mempunyai fungsi sebagai penyusun program kerja, penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, dan pelaksanaan monitoring. Fungsi tersebut di terapkan pada bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong sektor pariwisata dan memperkuat kerja sama internasional, Kota Bandar Lampung turut mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, tercatat sebanyak 9.839 wisatawan mancanegara berkunjung sepanjang tahun 2023 (Sri, 2024). Angka ini mencerminkan semakin terbukanya akses masuk bagi warga negara asing (WNA) ke wilayah Indonesia, salah satunya melalui kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Meski sebagian besar WNA datang sebagai wisatawan dalam jangka waktu singkat, namun pada kenyataannya, kehadiran mereka tidak selalu bersifat sementara. Banyak di antaranya yang menetap lebih lama karena berbagai alasan seperti pekerjaan, investasi, atau bahkan kegiatan lainnya yang memerlukan perhatian serta pengawasan dari pihak berwenang.

Peningkatan ini tentu menjadi sorotan tersendiri, khususnya bagi pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang memiliki peran dalam pengawasan orang asing. Jika tren ini terus meningkat tanpa disertai sistem pengawasan yang optimal, dikhawatirkan akan memunculkan berbagai potensi permasalahan, baik dari sisi sosial, keamanan, hingga ketertiban administrasi kependudukan.

Data terbaru menunjukkan bahwa per Juni 2024, terdapat 10 WNA yang secara resmi mengajukan izin tinggal di Kota Bandar Lampung, dan diwajibkan untuk melapor setiap bulan kepada pihak migrasi. (Sri,2024).Pada Juli 2024, 12 WNA asal Nigeria diamankan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung karena melanggar izin tinggal, dimana ada 9 orang di antaranya telah overstay, sementara 3 lainnya masih memiliki izin tinggal yang berlaku (Hadiyatna, 2024). Sepanjang tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung telah mendeportasi 11 WNA,yang mayoritas berasal dari Nigeria, serta masing-masing satu dari Prancis dan Myanmar. Umumnya, pelanggaran yang dilakukan berupa penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja (Rohlita, 2025,)Fakta ini menegaskan perlunya pengawasan yang optimal terhadap keberadaan WNA, tidak hanya dalam konteks jumlah tetapi juga terkait aktivitas dan legalitas izin tinggal mereka. Peran lembaga seperti Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik turut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah di tengah arus globalisasi yang semakin dinamis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung, tercatat sejumlah WNA dengan latar belakang kewarganegaraan serta tujuan keberadaan yang beragam. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi tersebut, data mengenai jumlah,asal negara, serta aktivitas WNA di Kota Bandar Lampung disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1 . 1 Data Warga Negara Asing

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Sektor Usaha
1	Jose Joaquim DeCarvalvo	L	Portugal	-
2	Jacob Matthew Brinkman	L	Amerika Serikat	Pendidikan
3	Jesus Jr. Penolio Escuro	L	Philipina	Pendidikan
4	Arby Rolly Bayquin Lagrada	L	Philipina	Pendidikan
5	Rhea Tagumpama Gonzales	P	Philipina	Pendidikan
6	Laila Condat Campo	P	Philipina	Pendidikan
7	Li Lirong	P	China	Pendidikan
8	Wei Yang	L	China	Teknologi
9	Dawnei Rose Hess	P	Amerka Serikat	Pendidikan
10	Wael Shoukry Ahmed Abdallah Aboelnaga	L	Mesir	Tidak Bekerja
11	Atanacia Moral Dianco	P	Philipina	Mekanik
12	Rajab Ali	L	Pakistan	Wirausaha
13	Sm Shohel Akhter	L	Bangladesh	Tidak Bekerja
14	Kartik Bevinamarad	L	India	Mekanik
15	Jiangtao Rong	L	China	Mekanik
16	Summit Kumar Singh	L	India	Mekanik
17	Habib Allah Bendjama	L	Perancis	Wirausaha
18	Li Qichun	L	China	Mekanik
19	Seah Sui Liang	L	Singapura	Teknologi
20	Chen Yinglei	L	China	Mekanik
21	Andrew Lee Johnson	L	Amerika Serikat	Mekanik
22	Patrice Dery	L	Kanada	Manager Operasional
23	Apple Collado Zosa	L	Philipina	Pendidikan
24	Wu Jingye	L	China	Pendidikan

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa keberadaan WNA di Kota Bandar Lampung memiliki variasi baik dari segi jumlah, asal negara, maupun aktivitas. Variasi ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam proses pengawasan, karena setiap WNA memiliki tujuan keberadaan yang berbeda beda, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga kegiatan keagamaan. Perlu

ditekankan bahwa data jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang disajikan dalam tabel/paragraf di atas merupakan data administratif yang bersumber dari catatan pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung. Data ini tidak merepresentasikan total populasi WNA secara keseluruhan yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung secara de facto, melainkan hanya mencakup WNA yang telah menjalankan kewajiban melapor keberadaannya kepada pemerintah daerah melalui Kesbangpol. Hal ini sekaligus menjadi indikator awal dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana tingkat kepatuhan administratif WNA dan efektivitas jangkauan pendataan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung melaksanakan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) melalui berbagai kegiatan yang bersifat preventif maupun kuratif. Bentuk pengawasan tersebut meliputi: (1) pemantauan rutin terhadap keberadaan dan aktivitas WNA untuk memastikan kelengkapan dokumen keimigrasian, (2) koordinasi dengan instansi terkait seperti Imigrasi dan Kepolisian dalam rangka penegakan hukum dan pengawasan yang lebih efektif, (3) sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku bagi WNA, (4) evaluasi dan pelaporan berkala sebagai dasar pengambilan kebijakan, serta (5) penanganan konflik yang berkaitan dengan isu toleransi, radikalisme, maupun potensi gesekan sosial antara WNA dan masyarakat lokal. Melalui bentuk-bentuk pengawasan ini, Kesbangpol berupaya memastikan keberadaan WNA di Kota Bandar Lampung berjalan sesuai peraturan, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah..

Selain itu, pengawasan terhadap WNA juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dalam Pasal 69 mengatur bahwa untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Menteri atau Pejabat

Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan orang asing (Undang Undang No.6, 2011). Ketentuan ini memperkuat posisi lembaga-lembaga seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan kunjungan WNA, seperti Kota Bandar Lampung. Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan terstruktur, pengawasan terhadap WNA tidak hanya menjadi kewajiban administratif semata, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan kedaulatan negara.

Pengawasan terhadap WNA di Indonesia dilakukan melalui sinergi antarinstansi, salah satunya adalah melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Tim ini terdiri dari berbagai pihak, termasuk Imigrasi, Kepolisian, dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat daerah. Tugas utama mereka adalah melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan keberadaan WNA agar tidak melanggar aturan hukum yang berlaku serta menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat (Fakhrudin dkk., 2022).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung sebagai salah satu anggota Tim PORA memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan terhadap WNA. Kota Bandar Lampung sendiri menjadi salah satu tujuan WNA, baik untuk bekerja maupun menetap. Berdasarkan data terbaru, terdapat WNA yang tinggal di Bandar Lampung namun bekerja di luar kota, seperti di Lampung Selatan. Hal ini tentu menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pengawasan dan pemantauan aktivitas mereka..

Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung menjadi aspek penting dalam pengawasan Warga Negara Asing (WNA), agar seluruh aktivitas mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesbangpol menjalin kerja sama

dengan berbagai instansi terkait, seperti Kantor Imigrasi, Kepolisian, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja. Dengan Imigrasi, koordinasi difokuskan pada pertukaran informasi mengenai status keimigrasian WNA, termasuk izin tinggal, visa, dan potensi pelanggaran. Bersama Kepolisian, Kesbangpol melaksanakan patroli dan operasi gabungan untuk menegakkan aspek keamanan. Sementara itu, koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja ditujukan untuk memastikan legalitas tenaga kerja asing serta mencegah praktik eksploitasi. Melalui pola koordinasi lintas instansi ini, pengawasan terhadap WNA di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan efektif.

Kesbangpol menyelenggarakan forum koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari instansi pemerintah, organisasi sipil, dan komunitas masyarakat lokal. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk membahas isu-isu terkini yang berkaitan dengan keberadaan warga negara asing, termasuk potensi konflik sosial, masalah integrasi, dan tantangan yang dihadapi masyarakat lokal, dan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam pengawasan dan pengaturan warga negara asing. Kesbangpol juga berperan dalam mengedukasi masyarakat lokal dan warga negara asing tentang hak dan kewajiban masing-masing. Koordinasi dengan instansi terkait untuk mengadakan seminar, lokakarya, dan kampanye informasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan yang berlaku dan pentingnya toleransi serta kerjasama antara warga negara asing dan masyarakat lokal. Serta mengedukasi warga negara asing tentang norma dan budaya lokal untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat berakir pada konflik.

Bentuk koordinasi lainnya dilakukan pada aspek pengumpulan data dan informasi. Pada aspek ini Kesbangpol berkolaborasi dengan instansi lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai warga negara asing. Ini mencakup Database Warga Negara Asing, yaitu membuat

dan memelihara database yang berisi informasi tentang warga negara asing yang tinggal di Kota Bandar Lampung, termasuk status keimigrasian, pekerjaan, dan aktivitas sosial. Serta analisis dan pelaporan, yaitu melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih baik. Jika terjadi pelanggaran oleh warga negara asing, Kesbangpol berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani kasus tersebut secara efektif. Ini mencakup proses penegakan hukum, yaitu Bekerja sama dengan kepolisian dan Kantor Imigrasi untuk memverifikasi pelanggaran hukum, termasuk deportasi jika diperlukan. Serta pendampingan sosial, yaitu menyediakan dukungan bagi warga negara asing yang terlibat dalam kasus hukum, termasuk akses ke layanan hukum dan sosial.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap WNA tidak terlepas dari berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, hingga tingkat kepatuhan WNA dalam melaporkan keberadaannya secara rutin. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, guna mengetahui sejauh mana efektivitas peran mereka serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada.

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan topik pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) oleh instansi pemerintah. Berikut adalah ringkasan dari penelitian-penelitian tersebut:

Penelitian yang pertama disusun oleh Haryanto dan Lengkong (2022) yang berjudul "Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam Pengawasan Orang Asing di Provinsi Sulawesi Utara".

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado telah menerapkan kebijakan *selective policy* dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Kinerja pengawasan dinilai produktif melalui

berbagai kegiatan lapangan dan tindak lanjut laporan masyarakat terkait keberadaan orang asing.

Penelitian yang kedua disusun oleh Susanti, Haskar, dan Chofa (2023) yang berjudul “Implementasi Pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi”. Hasil dari penelitian ini menyoroti peran aktif Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi dalam mengawasi organisasi masyarakat (ormas) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017. Ditemukan bahwa pengawasan dilakukan melalui laporan masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait, meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Penelitian yang ketiga disusun oleh Dewi, Kusumastuti, dan Waskita (2024) yang berjudul “Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di Provinsi Lampung”. Hasil dari Studi ini mengungkapkan bahwa Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas melalui kunjungan, sosialisasi, dan dialog interaktif. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan ormas sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta mencegah penyimpangan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Penelitian yang ke empat disusun oleh Praditya dan Wibowo (2023) berjudul “Urgensi Operasi Pengawasan WNA dalam Kaitannya dengan Stabilitas Sosial Ekonomi Masyarakat”. Hasil dari Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap WNA untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ditemukan bahwa pengawasan yang efektif dapat mencegah pelanggaran keimigrasian yang berdampak negatif pada sektor ekonomi dan sosial masyarakat.

Penelitian yang kelima disusun oleh Nurjati dkk. (2023) berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan WNA Mengenai Izin Tinggal” Hasil dari Studi ini membahas peran pemerintah daerah, termasuk Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dalam mengawasi izin tinggal WNA.

Ditekankan bahwa pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa sebagian besar fokus pada peran Kantor Imigrasi dalam pengawasan WNA dan peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam pengawasan organisasi masyarakat. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik meneliti peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam pengawasan WNA, khususnya di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung dalam pengawasan terhadap WNA

Penilaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung merupakan salah satu faktor penting dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang berada di wilayah tersebut. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik memiliki kewenangan strategis dalam hal koordinasi, pendataan, serta pelaporan keberadaan dan aktivitas WNA dengan bekerja sama dengan instansi lainnya.. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung dan menyusun skripsi dengan judul: **“Analisis Kinerja Terhadap Pengawasan Warga Negara Asing (Studi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung)”**.

Dengan menganalisis kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam pengawasan WNA, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas pengawasan, sekaligus memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pengawasan WNA di Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui dan menganalisis kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA).

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam hal manajemen kinerja instansi pemerintah dan pengawasan terhadap keberadaan Warga Negara Asing.

- 2) Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap WNA, serta sebagai masukan bagi Tim PORA untuk memperkuat koordinasi dan strategi pengawasan lintas sektor.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian performance yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja (Wibowo, 2011). Menurut Mahsun, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah disiapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai (Mahsun, 2006). Menurut Basri dalam Sinambela, kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, kriteria, target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu yang telah disepakati bersama (Sinambela, 2012). Sedangkan Robbins dalam Sinambela mendefinisikan kinerja sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu proses pencapaian pada diri individu maupun kelompok dalam memenuhi kriteria keberhasilan yang hendak dicapai. Ketercapaian kinerja dapat dilihat dari bagaimana hasil kerja atau

prestasi kerja tersebut memenuhi standar nilai, sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah dibentuk

2.2 Tinjauan Tentang Organisasi

2.2.1 Pengertian Organisasi

Menurut Sulistiyani dan Rosidah, organisasi diartikan sebagai sekumpulan orang yang di dalamnya melakukan kerjasama dengan melalui pola hubungan yang bersifat sekunder, sehingga tidak ada terikat kaitan emosional, yang terintegrasi dalam sebuah lingkungan sosial yang lebih luas dan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan (Sulistiyani dan Rosidah, 2009). Argyris dalam Kusdi mendefinisikan organisasi sebagai suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha banyak orang (Kusdi, 2009). Sedangkan menurut Griffin dalam Sule dan Saefullah, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu (Sule dan Saefullah, 2005).

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa organisasi merupakan sebuah wadah yang berisi dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan yang sama dan bekerja sama dalam sebuah struktur dan koordinasi yang bertujuan untuk menjalankan visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

2.2.2 Jenis-jenis Organisasi

Menurut Kusdi, jika dilihat dari aspek tujuan, produk yang dihasilkan, cara pengambilan keputusan dan ukuran kerja. Secara umum organisasi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu: (Kusdi, 2009)

- a. Organisasi publik, yaitu organisasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, tidak pada laba (*non profit oriented*).
- b. Organisasi bisnis, yaitu organisasi yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*).

Menurut Wursanto, organisasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu: (Wursanto, 2003).

- a. Organisasi dari segi jumlah pucuk pimpinan. Berdasarkan segi jumlah pucuk pimpinan, organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi tunggal dan organisasi jamak.
 - 1) Organisasi tunggal merupakan organisasi yang memiliki pucuk pimpinan di tangan satu orang. Nama pimpinan yang digunakan tergantung dari jenis kegiatan organisasi, misalnya manajer
 - 2) Organisasi Jamak merupakan organisasi yang pucuk pimpinannya berada di tangan beberapa orang pimpinan yang merupakan satu kesatuan. Nama dari kesatuan pimpinan tersebut tergantung dari jenis dan fungsi organisasi atau lembaga tersebut, misalnya Majelis, Direksi.
- b. Organisasi dari segi keresmian. Menurut keresmiannya organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi formal dan organisasi informal
 - 1) Organisasi formal adalah organisasi yang kegiatannya dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar dan dikoordinasikan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga orang-orang yang tergabung dalam kelompok tersebut mempunyai struktur yang jelas
 - 2) Organisasi informal adalah organisasi yang disusun secara bebas dan spontan serta keanggotaannya diperoleh secara sadar atau tidak sadar, dimana kapan seseorang menjadi anggota sulit ditemukan. Tujuan organisasi informal juga tidak dirinci secara tegas dan biasanya organisasi ini bersifat

sementara karena pembentukannya tidak didasarkan atas rencana yang matang dan jelas.

- c. Organisasi dari segi tujuan. Berdasarkan segi tujuan yang hendak dicapai, organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi niaga/ ekonomi dan organisasi sosial/ kemasyarakatan.
 - 1) Organisasi niaga/ ekonomi adalah organisasi yang memiliki tujuan utama yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kegiatan yang dilakukan organisasi ini adalah melakukan produksi dan mendistribusikan barang dan jasa
 - 2) Organisasi sosial/ kemasyarakatan merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1.).

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa jenis-jenis organisasi dapat dilihat dari bagaimana tujuan organisasi tersebut dibentuk, produk yang dihasilkan dalam suatu organisasi, jumlah kepala pimpinan serta segi keresmian organisasi tersebut. Secara umum, jenis-jenis organisasi terdiri atas organisasi publik dan organisasi bisnis.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung merupakan organisasi publik yang bergerak di bawah koordinasi pemerintah daerah dengan fungsi utama menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta melakukan pembinaan terhadap wawasan kebangsaan. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada laba (*non-profit oriented*), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang bersifat administratif dan koordinatif, khususnya dalam hal pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA). Dilihat

dari struktur organisasi nya , Kesbangpol merupakan organisasi formal yang memiliki struktur yang jelas dan *hierarkis*, dengan kepala badan sebagai pucuk pimpinan yang mengkoordinasikan berbagai bidang, termasuk bidang kewaspadaan nasional yang berperan penting dalam deteksi dini potensi ancaman di wilayah kota. Struktur yang sistematis ini menjadi dasar utama dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal melalui kerja sama lintas sektor.

2.3 Tinjauan Tentang Kinerja Organisasi

2.3.1 Pengertian Kinerja Organisasi

Pada dasarnya konsep kinerja dapat dilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi (Pasolong, 2010). Menurut Pasolong, kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut (Pasolong, 2010). Menurut Nasucha dalam Sinambela, kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik guna meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif (Sinambela, 2012). Sedangkan menurut Tangkilisan, kinerja organisasi adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya (Tangkilisan, 2007).

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan proses yang dilakukan serta hasil kerja yang dihasilkan suatu organisasi dalam

mencapai tujuan, visi, misi serta sasaran yang telah disepakati bersama antar individu atau sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut.

2.3.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Dalam pelaksanaan kinerja, ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja itu sendiri. Menurut Atmoesoeparto dalam Tangkilisan, kinerja dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu: (Tangkilisan, 2007)

- a. Faktor internal yang terdiri dari;
 - 1) Tujuan organisasi, yakni apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi
 - 2) Struktur organisasi, sebagai hasil design antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang sudah ada
 - 3) Sumber daya manusia, yakni kualitas dan pengelola anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
 - 4) Budaya organisasi, yakni gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.
- b. Faktor eksternal yang terdiri dari;
 - 1) Faktor politik, hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuatan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi dalam berkarya secara maksimal
 - 2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli yang menggerakkan sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang besar.

- 3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat yang memengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam organisasi, seperti tujuan organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan budaya organisasi. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar organisasi, seperti faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial.

2.3.3 Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan sebagai penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan/ atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi instansi pemerintah (Pasolong, 2007). Menurut Mahsun, pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi, sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja (Mahsun, 2006). Menurut Mardiasmo dalam Sinambel, pengukuran kinerja organisasi publik memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu: (1) Membantu memperbaiki kinerja pemerintah (organisasi publik) agar kegiatan pemerintah terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja; (2) Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan; dan (3) Mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Sinamebela, 2012).

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu cara untuk memperoleh penilaian atas hasil kerja yang telah diselesaikan. Tujuan dilakukannya pengukuran terhadap kinerja adalah untuk menghasilkan manajemen yang lebih efisien guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

2.3.4 Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi

Indikator kinerja merupakan sarana atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manajer atau pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. Hal ini berarti bahwa untuk menilai organisasi terbaik, maka perlu digunakan standar kinerja organisasi terbaik tersebut yang di dalamnya memuat indikator-indikator kinerja dengan nilai tertentu. Menurut Mahmudi, informasi mengenai kinerja sangat penting dalam rangka menciptakan *good governance*. Manajemen yang baik dan akuntabel membutuhkan indikator kinerja untuk mengukur sukses atau tidaknya organisasi. Informasi kinerja tersebut diorientasikan sebagai pedoman bukan sebagai alat pengendali. Indikator bagi tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan (Mahmudi, 2015).

Mengingat karakteristik organisasi sektor publik yang unik, organisasi ini memerlukan pengukuran yang luas tidak hanya mengukur tingkat laba, efisiensi atau hanya pada ukuran finansial saja. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik menurut Mahsun, meliputi enam indikator, yaitu: (Mahsun, 2006).

- a. Kelompok masukan (*input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

- b. Kelompok proses (*process*), adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun ukuran tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c. Kelompok luaran (*output*), adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*), maupun tidak berwujud (*intangible*).
- d. Kelompok hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
- e. Kelompok manfaat (*benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
- f. Kelompok dampak (*impact*), adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan dalam suatu organisasi atau analisator untuk mengukur ketercapaian suatu organisasi dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, mengevaluasi serta memantau kinerja organisasi. Meskipun Mahsun (2006) mengemukakan enam indikator kinerja secara komprehensif, penelitian ini membatasi analisis pada empat indikator utama, yaitu: *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Pembatasan ini dilakukan atas pertimbangan *span of control* (rentang kendali) organisasi, dimana indikator *input* hingga *outcome* berada sepenuhnya dibawah kendali manajerial Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung. Sementara itu, indikator *benefit* dan *impact* dieksklusi karena dipengaruhi oleh variabel eksogen yang kompleks di luar kendali instansi, seperti kebijakan fiskal pusat dan dinamika geopolitik global. Mengatribusikan dampak makro tersebut semata mata pada kinerja Kesbangpol akan mengurangi validitas kausal dalam evaluasi ini.

Berikut adalah tabel indikator pengukuran kinerja pada penelitian ini.

Tab 2 . 1. Indikator Pengukuran Kinerja

No	Program Kerja	Indikator pengukuran Kinerja	Hasil Analisis
1	Pemantauan Keberadaan WNA	1. proses ; Frekuensi kegiatan pemantauan dalam periode tertentu, ketepatan jadwal, dan kelengkapan prosedur 2. output ; jumlah WNA yang berhasil di data, jumlah laporan hasil pemantauan	
2	Koordinasi Dengan Instansi Terkait	1. Proses ; Jumlah rapat koordinasi, kehadiran instansi terkait, dan kualitas komunikasi 2. Outcome ; Tercapainya sinkronisasi data dan strategi antarinstansi	
3	Sosialisasi dan Edukasi	1. Output ; Jumlah materi/brosur/video yang dihasilkan, jumlah masyarakat yang mendapat informasi 2. Outcome ; Peningkatan pemahaman masyarakat terkait aturan keberadaan WNA	
4	Monitoring dan Pelaporan keberadaan WNA	1. Proses ; Ketepatan waktu pembuatan pelaporan, kelengkapan dan akurasi data. 2. Output ; Jumlah laporan yang dihasilkan dan diserahkan ke pihak terkait	

Sumber ; Diolah oleh peneliti, 2025

2.4 Tinjauan Tentang Pengawasan

2.4.1 Pengertian Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata awas, yang berarti penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu

sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan (Fachruddin, 2006). Menurut Siagian, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional (Siagian, 2007). Mockler dalam Yahya mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan (Yahya, 2006). Sedangkan menurut Dale dalam Winardi, pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. (Winardi, 2000)

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan pemantauan atau penjagaan yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menghindarkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran atau penyelewengan agar tujuan daripada kegiatan yang dilakukan berjalan dengan maksimal.

2.4.2 Tujuan Pengawasan

Sukamadi mengemukakan bahwa tujuan dilakukannya pengawasan adalah: (Sukmadi, 2012)

- a. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaannya.

- c. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, ketidaksesuaian, penyimpangan lainnya yang terjadi atas tugas dan wewenang.
- d. Supaya sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditentukan.
- e. Meminimalkan biaya
- f. Untuk memecahkan masalah
- g. Mengantisipasi kompleksitas dari organisasi

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengantisipasi terjadinya ketidaksesuaian, pelanggaran, penyelewengan ataupun masalah-masalah lain yang dapat merugikan organisasi tersebut sehingga nantinya pengawasan ini dapat pula menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi dalam mengatasi masalah atau kelemahan yang timbul

2.4.3 Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Situmorang dan Juhir, untuk mencapai tujuan negara dan organisasi, maka dapat diklasifikasikan jenis-jenis pengawasan sebagai berikut: (Situmorang dan Juhir, 1998)

a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagiannya tanpa pengawasan “on the spot”.

b. Pengawasan *Preventif* dan *Represif*

1) Pengawasan *Preventif*

Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang menekankan pada pencegahan, jangan ada kesalahan di kemudian hari. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

2) Pengawasan *Represif*

Pengawasan yang bersifat represif adalah memperbaiki kesalahan yang telah terjadi sehingga di kemudian hari jangan sampai terulang lagi. Pengawasan dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c. Pengawasan *Intern* dan Pengawasan *Ekstern*

1) Pengawasan *Intern*

Pengawasan dapat dikatakan intern jika antara pengawas dan yang diawasi mempunyai hierarkis atau masih dalam hubungan pekerjaan (dalam kelompok eksekutif sendiri).

2) Pengawasan *Ekstern*

Pengawasan ekstern, terjadi jika antara pengawas dengan yang diawasi tidak mempunyai hubungan hierarkis atau berada di luar eksekutif. Pengawasan dilakukan oleh aparat dari luar organisasi.

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa jenis-jenis pengawasan terdiri dari tiga bagian, yaitu: pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, serta pengawasan intern dan ekstern.

2.4.4 Karakteristik Pengawasan Yang Efektif

Menurut Amirullah dan Budiyo, sistem pengawasan yang efektif mempunyai karakteristik antara lain: (Amirullah dan Budiyo,2004).

a) Tepat Waktu

Sistem pengawasan akan efektif jika dilakukan dengan cepat di saat penyimpangan diketahui. Jika terjadi kelambatan dalam reaksi terhadap penyimpangan, kerugian yang dihadapi akan semakin besar. Untuk menghindari hal ini perlu dilakukan pengawasan secara rutin, tetapi untuk hal-hal yang sangat penting perlu dilakukan pengawasan di luar kontrol.

b) Dipusatkan pada pengendalian strategik

Pengendalian hendaknya diarahkan pada titik-titik kunci sehingga penyimpangan di bidang ini dapat segera diketahui dan dapat dihindarkan timbulnya kegagalan pencapaian tujuan.

c) Terkoordinasi dengan arus kerja organisasi

Memperhatikan bahwa satu kegiatan akan selalu terkait dengan kegiatan lain, maka sistem pengendaliannya juga harus dikoordinasikan dengan kegiatan lain yang erat hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan pengawasan tersebut.

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik dari sistem pengawasan yang efektif adalah pengawasan dilaksanakan tepat waktu, dipusatkan pada pengendalian strategik serta terkoordinasi dengan arus kerja dalam suatu organisasi.

2.5 Tinjauan Tentang Orang Asing

2.5.1 Pengertian Orang Asing

Orang asing dalam Kamus Hukum, didefinisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut

(Safaat,2008). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengertian orang asing adalah “orang yang bukan warga negara Indonesia”.

Supramono memberi pengertian orang asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing (Supramono, 2011).

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa definisi orang asing adalah seseorang dan termasuk pula badan hukum asing yang berada di suatu negara, namun kedudukannya bukan sebagai warga negara tersebut.

2.5.2 Hak Orang Asing di Indonesia

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Menurut Supramono, kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang, hak tersebut antara lain melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya, kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya. Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan oleh Indonesia untuk melindungi perusahaan nasional.

Meskipun demikian, Indonesia juga membuka bidang tertentu untuk perusahaan asing dalam melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri. Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia (Supramono, 2012).

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa hak orang asing yang berada di Indonesia telah dijamin dalam undang-undang, beberapa di antaranya adalah hak untuk melakukan jual beli, melaksanakan perkawinan serta hak untuk memperoleh status sebagai warga negara Indonesia. Orang asing yang berada di Indonesia juga diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis, namun jumlah bisnis yang didirikan dibatasi, keadaan ini diciptakan oleh Indonesia untuk melindungi perusahaan nasional.

2.5.3 Kewajiban Orang Asing Di Indonesia

Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat berada di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk dilakukan dalam rangka pengawasan orang asing. Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban sebagai berikut: (Supramono, 2012).

- 1) Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan;
- 2) Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Paspor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan keimigrasian;

- 3) Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kewajiban orang asing yang berada di wilayah Indonesia beberapa diantaranya adalah kewajiban memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri, memperlihatkan surat perjalanan atau paspor serta mendaftar diri kembali jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

2.6 Tinjauan Tentang Pengawasan Warga Negara Asing

Menurut Sihombing dalam Putri, bentuk pengawasan yang dilakukan dalam upaya pengawasan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu: (Putri, 2016)

- a) Pengawasan Administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui surat-surat atau dokumen berupa pencatatan, pengumpulan, pengelolaan data dan penyajian serta penyebaran informasi secara manual dan elektronik mengenai lalu lintas keberadaan dan kegiatan warga negara asing.
- b) Pengawasan Lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian warga negara asing dan alat bukti yang berhubungan dengan tandapengenal keimigrasian. Pengawasan lapangan ini dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi

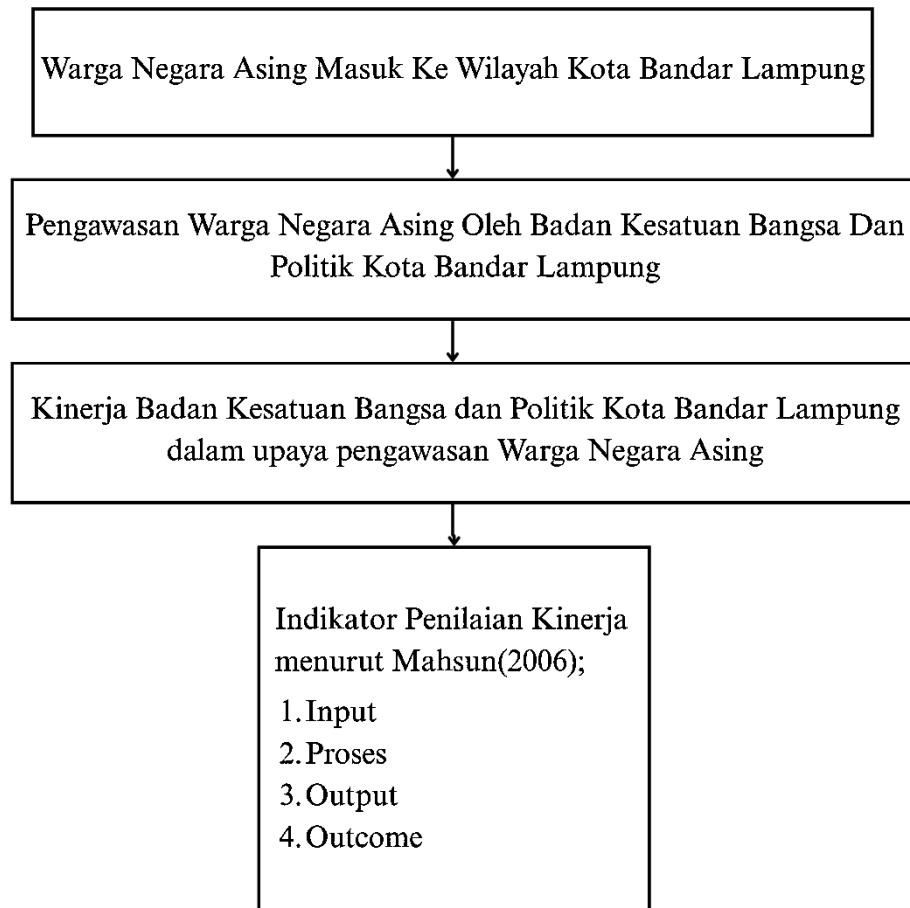
Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa upaya dalam mengawasi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia terbagi atas dua macam, yakni pengawasan administratif melalui surat atau dokumen serta pengawasan lapangan berupa pemantauan dan patroli.

2.7 Kerangka Berpikir

Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) menjadi isu penting seiring meningkatnya arus globalisasi dan keterbukaan akses kunjungan internasional ke Indonesia, termasuk ke wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah melalui kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) memberikan kemudahan masuk bagi WNA, yang berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing. Namun, kehadiran WNA tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan, sosial, dan stabilitas nasional apabila tidak diawasi secara optimal.

Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung memiliki peran strategis sebagai lembaga pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pengawasan dan deteksi dini terhadap keberadaan dan aktivitas WNA. Kinerja organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam melaksanakan pengawasan menjadi hal penting untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana peran lembaga ini berjalan efektif.

Kinerja organisasi mengacu pada sejauh mana sebuah instansi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari aspek input, proses, output, hingga outcome. Dalam penelitian ini, kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diukur dari aspek Pelaksanaan kebijakan, pemantauan WNA, koordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi, edukasi, monitoring, dan pelaporan keberadaan WNA. Dengan menggunakan pendekatan kinerja organisasi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang efektivitas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam mengawasi keberadaan WNA di wilayah Kota Bandar Lampung.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber :Diolah oleh peneliti, (2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitiannya menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2010). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing.

Tipe penelitian deskriptif menjadikan penelitian ini menitikberatkan pada upaya untuk memberikan gambaran umum secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat fenomena yang diselidiki dari objek penelitian serta dipaparkan dengan apa adanya. Pendeskripsian tersebut menggambarkan secara tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing.

Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu untuk memahami dan menganalisis secara mendalam bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan terhadap WNA. Metode kualitatif

dianggap paling sesuai karena mampu menggambarkan fenomena sosial, kebijakan, dan praktik birokrasi secara kontekstual dan menyeluruh. Melalui penekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, serta dinamika kerja para pelaksana kebijakan di lapangan, termasuk dalam hal koordinasi, pelaporan, dan fasilitasi, hingga pemantauan terhadap aktivitas WNA. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap paling tepat dalam menjawab fokus dan permasalahan dalam penelitian ini.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Warga Negara Asing. Fokus ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menjalankan peran dan fungsinya sebagai bagian dari sistem pengawasan terhadap WNA di wilayah Kota Bandar Lampung.

Secara spesifik, fokus penelitian ini mencakup beberapa Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kesbangpol dalam pelaksanaan pengawasan WNA yang berlandaskan pada Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 68 Tahun 2021 Pasal 11 ayat (2) dan (3) Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung adalah;

- 1) Pemantauan Keberadaan WNA
- 2) Koordinasi dengan Instansi Terkait
- 3) Sosialisasi dan Edukasi
- 4) Monitoring dan Pelaporan Keberadaan WNA

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung, yang berlokasi di Jl. Dr. Susilo No. 2, Pahoman, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas peran strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban umum, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan, termasuk dalam hal pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA). Selain itu, Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata juga menjadi daerah yang cukup terbuka terhadap mobilitas WNA, sehingga menjadikan peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam pengawasan WNA semakin penting untuk diteliti.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1) Data Primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai (Moleong, 2009). Data primer diperoleh peneliti dengan cara menggali informasi langsung dari informan yang dianggap memahami hal-hal mengenai kinerja dan kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi dari data primer. Data ini dapat berupa sumber tertulis di luar kata dan tindakan, dapat berupa naskah, dokumen resmi, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa undang-undang ataupun peraturan yang berhubungan dengan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dalam upaya pengawasan warga negara asing sebagai berikut;

- 1) Peraturan Walikota Bandar Lampung No.68 Tahun 2021
- 2) SK Pembentukan Tim Monitoring dan Pemantauan Pendataan Orang Asing Kota Bandar Lampung Tahun 2025
- 3) Undang Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 4) Permendagri No. 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah
- 5) Perpres No.95 Tentang Bebas Visa Kunjungan Tahun 2024

3.4.2 Sumber Data

Dalam Penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari;

1. Informan

Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan yang memiliki keterlibatan dalam proses pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Kota Bandar Lampung. Informan berikut dipilih sesuai dengan kebutuhan dari fokus penelitian yang telah dibuat. Sehingga informan yang dipilih bersangkutan langsung dengan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi koridor penelitian yang sudah dibuat pada fokus penelitian.

Adapun Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3. 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Alasan dipilih sebagai informan
1	Nuri.,S.H	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung	Representasi dari Badan Kesbangpol yang berperan sebagai koordinator Tim PORA di tingkat kota. Memberikan sudut pandang mengenai sinergi antar instansi, peran Kesbangpol dalam pengawasan WNA,serta evaluasi kinerja kolaborasi lintas sektor
2	Tommy Martino Sriyatna., S.H	Kepala Seksi Intelejen & Penindakan Keimigrasian (Kasi Inteldakim)	Bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pengawasan dan penindakan WNA, memiliki informasi rinci terkait kegiatan operasional pengawasan di lapangan
3	Warga Negara Asing	-	Pendapat WNA menjadi data penting untuk mengetahui aspek persepsi, transparansi, dan pendekatan preventif dari Kesbangpol dan instansi lainnya.
4	Warga lokal atau tokoh Masyarakat	-	Kelompok ini dipilih sebagai informan karena dapat memberikan data kontekstual mengenai kehadiran WNA di lingkungan mereka serta sejauh mana pengawasan WNA di ketahui dan dirasakan oleh masyarakat setempat.

Sumber; data diolah oleh peneliti (2025)

2. Dokumen

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan arsip yang mendukung penelitian. Dokumen tersebut meliputi laporan tahunan, data rekapitulasi jumlah WNA, laporan kegiatan pengawasan, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah

terkait pengawasan orang asing, serta berita atau publikasi resmi dari media terpercaya dan instansi pemerintah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dengan maksud mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 2002). Adapun dokumen yang diperlukan untuk mendukung keakuratan data dalam penelitian ini yaitu peraturan dan/atau undang-undang yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan warga negara asing oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung.

3) Observasi Langsung

Peneliti menggunakan teknik observasi langsung untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara. Observasi dilakukan secara non-partisipan, di mana peneliti mengamati secara pasif tanpa terlibat dalam aktivitas objek yang diteliti. Adapun hal-hal yang diobservasi meliputi:

- a) Mekanisme Pelayanan: Mengamati proses WNA atau penjamin saat melakukan pelaporan keberadaan di kantor Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung.
- b) Kondisi Infrastruktur: Mengamati ketersediaan perangkat pendukung digital dan basis data yang digunakan aparatur dalam memverifikasi identitas WNA.
- c) Interaksi Koordinatif: Mengamati dinamika komunikasi antar- aparatur dalam menjalankan fungsi pengawasan harian.

Teknik observasi ini bertujuan untuk melakukan triangulasi metode, yakni memverifikasi apakah prosedur yang dijelaskan oleh informan dalam wawancara sesuai dengan realitas praktik yang terjadi di lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik mengolah data menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama. Miles dan Huberman dalam Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2010). Berikut langkah langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam tahap ini, peneliti menyaring dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai pelaksanaan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Kota Bandar Lampung.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk naratif yang mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam observasi dan wawancara untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola, hubungan antar kategori, serta dinamika pelaksanaan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses mengidentifikasi temuan-temuan penting yang muncul di lapangan

3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti turun ke lapangan, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (derajat kepercayaan data), uji *transferability* (derajat keteralihan), uji *dependability* (derajat kebergantungan) dan uji *confirmability* (derajat kepastian). (Sugiyono, 2010) Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Uji *Credibility* (Derajat Kepercayaan Data)

Menurut Emzir, kriteria *credibility* melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif kredibel (dapat dipercaya). Uji *credibility* meliputi perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif serta kecukupan referensi (Emzir, 2010). Uji kredibilitas

data atau kepercayaan terhadap data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi dan kecukupan referensi.

a) Triangulasi

Menurut Wiliam dalam Sugiyono, triangulasi dalam pengujian kredibilitas data adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbeda waktu (Sugiyono, 2010). Terdapat tiga metode triangulasi:

- 1) Triangulasi sumber; untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana pandangan yang spesifik.
- 2) Triangulasi teknik; untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu; dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara pengecekan sumber data atau teknik pengumpulan data dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan peneliti dengan melakukan pengecekan data terhadap sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yakni perpaduan dari teknik wawancara dan dokumentasi.

b) Kecukupan Referensi

Bahan referensi dalam uji *credibility* adalah adanya pendukung untuk membuktikan data-data yang telah dikumpulkan peneliti. Referensi dalam penelitian ini berupa rekaman wawancara, gambar atau foto, dokumen, dan lain sebagainya. Referensi dalam penelitian ini dikumpulkan dengan alat bantu perekam data seperti kamera dan alat perekam suara.

2. Uji *Transferability* (Derajat Keteralihan)

Menurut Emzir, kriteria *transferability* merujuk pada tingkat mana hasil dari penelitian kualitatif dapat ditransfer pada konteks lain (Emzir, 2010). Teknik ini dilakukan peneliti dengan melaporkan dan menguraikan hasil dari penelitian dengan cermat, rinci, dan mendalam. Hasil penelitian tersebut dilampirkan dan disajikan pada hasil dan pembahasan.

3. Uji *Dependability* (Kebergantungan)

Pengujian ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Pengujian *dependability* dalam penelitian ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji *Confirmability* (Derajat Kepastian)

Menurut Emzir, *confirmability* merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian dapat dikonfirmasi oleh orang lain (Emzir, 2010). Dalam penelitian ini, uji kepastian dilakukan dengan mengadakan seminar yang dihadiri oleh rekan sejawat beserta pembimbing dan pembahas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung dalam pengawasan Warga Negara Asing (WNA) melalui empat dimensi teori Mahsun (2006): *input, process, output, dan outcome*. Berdasarkan hasil analisis tematik dan interpretasi mendalam terhadap temuan lapangan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek Input (Ketersediaan Sumberdaya Dalam Pengawasan WNA)

Dari dimensi input, kinerja pengawasan masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran operasional. Keterbatasan ini menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan belum mencapai efektivitas optimal. Meskipun demikian, Kesbangpol menunjukkan kemampuan adaptif dengan mengandalkan koordinasi lintas instansi melalui forum Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Adaptasi ini memperlihatkan adanya *organizational intelligence* atau kecerdasan kelembagaan sebagaimana dikemukakan oleh Keban (2008), yakni kemampuan birokrasi untuk tetap berfungsi dalam kondisi sumber daya yang terbatas.

2. Aspek Proses (Proses Pelaksanaan Pengawasan WNA).

Pada dimensi proses, pelaksanaan pengawasan menunjukkan transisi dari mekanisme manual menuju sistem digital, namun masih terhambat oleh fragmentasi sistemik. Peneliti mengidentifikasi empat temuan krusial pada aspek ini:

- 1) Implementasi strategi Dual-Track Monitoring telah berjalan efektif melalui pembagian jalur pemantauan aktif dan pasif, di mana institusi pendidikan tinggi berperan sebagai penyangga (*buffer*) administratif bagi mahasiswa asing.
 - 2) Tata kelola koordinasi kolaboratif dalam Tim PORA telah terbentuk secara struktural, namun secara operasional masih bersifat *meeting-centric* yang mengakibatkan terjadinya latensi (jeda waktu) dalam pertukaran informasi strategis.
 - 3) Strategi sosialisasi mengalami kegagalan dalam menjangkau akar rumput, sehingga melahirkan fenomena *Silent Agency* dan bias pelaporan *Police-Centric* di masyarakat.
 - 4) Modernisasi monitoring melalui paradigma *Intelligence-Led Surveillance* (aplikasi Lini AI dan APOA V.2) telah dimulai, namun efektivitasnya belum optimal akibat belum adanya basis data terintegrasi (*shared database*) antar-instansi anggota Tim PORA.
3. Aspek Output (Hasil Dan Capaian Pengawasan WNA).
- pada dimensi output, hasil pengawasan telah mencapai target administratif secara kuantitatif namun belum mencapai efektivitas sistemik. Capaian nyata terlihat pada ketertiban pendataan WNA serta keberhasilan tindakan hukum keimigrasian, seperti deportasi dan penempatan di Rumah Detensi Imigrasi. Meskipun demikian, peneliti menilai bahwa output tersebut masih terbatas pada aspek kepatuhan birokrasi (*compliance*) dan belum mencerminkan kualitas pengawasan yang mampu mendeteksi potensi pelanggaran secara real-time akibat kendala integrasi data pada tahap proses.
4. Aspek Outcome (Dampak Pengawasan WNA Terhadap Ketertiban dan Keamanan Daerah).
- pada dimensi outcome, dampak pengawasan telah berhasil menciptakan stabilitas keamanan daerah, namun belum mampu mengubah perilaku subjek dan kesadaran masyarakat secara

substansial. Masyarakat merasakan adanya jaminan keamanan, tetapi peran mereka masih bersifat pasif-reaktif akibat minimnya literasi hukum keimigrasian. Sementara itu, subjek WNA merasakan adanya kepastian hukum, namun masih terdapat kecenderungan resistensi sosial dan fenomena *Dependency Trap* pada pihak penjamin (universitas/perusahaan). Hal ini menunjukkan bahwa outcome pengawasan baru mencapai dimensi ketertiban administratif, belum menyentuh dimensi kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Secara umum, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja Kesbangpol Kota Bandar Lampung berada pada tahap *compliance performance*, yakni kinerja yang berorientasi pada ketaatan prosedur dan aturan. Secara administratif dan koordinatif, pengawasan telah berjalan dengan baik, namun secara substansi belum bertransformasi menjadi *learning performance* yang berbasis pada integrasi teknologi dan partisipasi publik yang inklusif. Transformasi menuju digitalisasi koordinasi dan restrukturisasi strategi edukasi masyarakat menjadi prasyarat mutlak agar pengawasan WNA di masa depan dapat mencerminkan proses kinerja publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kompleksitas ancaman global di tingkat lokal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti merumuskan saran-saran praktis yang ditujukan kepada Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung dan instansi terkait dalam wadah Tim PORA sebagai berikut:

1. Saran Untuk Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung dan Instansi terkait;
 - 1) Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung perlu melakukan restrukturisasi sistem penugasan personel dari pola rotasi staf umum menjadi pembentukan jabatan fungsional analis kewaspadaan yang permanen. Penempatan staf analis yang

menetap bertujuan untuk membangun akumulasi keahlian teknis dalam deteksi dini intelijen sosial yang sering kali terhambat oleh pergantian personel secara berkala . Selain itu, instansi disarankan memberikan pelatihan teknis pengawasan keimigrasian bagi anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) agar kualitas laporan dari akar rumput menjadi lebih akurat dan relevan bagi kepentingan Tim PORA .

- 2) Kantor Imigrasi dan Badan Kesbangpol harus segera menginisiasi pengembangan platform shared database yang mengintegrasikan inovasi Lini AI dengan sistem pelaporan daerah . Digitalisasi koordinasi ini mendesak dilakukan guna mengakhiri ketergantungan pada mekanisme kerja yang bersifat meeting-centric dan manual yang memicu terjadinya latensi informasi strategis . Melalui sistem terpadu, data pergerakan WNA dari aplikasi APOA V.2 dapat diakses secara real-time oleh seluruh anggota tim guna mempercepat akselerasi deteksi dini dan respons lapangan .
- 3) Tim PORA Kota Bandar Lampung disarankan untuk merestrukturisasi strategi edukasi publik melalui pembentukan program "Kelurahan Binaan Urban" di wilayah dengan konsentrasi aktivitas WNA tinggi . Fokus program sosialisasi harus diperluas dari wilayah pedesaan menuju kawasan urban, khususnya di lingkungan sekitar perguruan tinggi dan area industri perkotaan. Langkah ini sangat krusial untuk mengatasi fenomena Silent Agency serta memitigasi pola pikir masyarakat yang masih bersifat Police-Centric atau hanya melapor jika terjadi gangguan keamanan umum saja .
- 4) Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mengintegrasikan kanal pelaporan keberadaan WNA secara langsung ke dalam aplikasi layanan publik kota (seperti sistem "Lapor!"). Penyediaan kanal pelaporan digital yang mudah diakses warga bertujuan untuk memotong rantai birokrasi berjenjang dari tingkat RT hingga

kecamatan yang selama ini menyebabkan distorsi informasi . Hal ini akan mengubah partisipasi masyarakat dari sekadar spontanitas menjadi data intelijen sosial yang dapat ditindaklanjuti secara sistemis.

- 5) Instansi pengawas wajib menyusun dan mendistribusikan panduan regulasi keimigrasian dalam skema multibahasa (seperti Bahasa Inggris dan Mandarin) guna meminimalisir hambatan komunikasi bagi subjek WNA . Penyediaan informasi yang inklusif secara digital sangat diperlukan untuk memutus fenomena Dependency Trap (jebakan ketergantungan) terhadap pihak kampus atau penjamin korporasi . Dengan akses informasi langsung dari otoritas, diharapkan terjadi transformasi dari kepatuhan administratif semu menjadi kesadaran hukum substantif yang berkelanjutan bagi seluruh warga asing di Kota Bandar Lampung.

2. Saran Untuk penelitian selanjutnya:

- 1) Meneliti efektivitas pengawasan WNA di tingkat kelurahan dan kecamatan dengan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data numerik terkait kepatuhan dan pelaporan WNA.
- 2) Mengkaji dampak sosial dan ekonomi keberadaan WNA terhadap masyarakat lokal, termasuk interaksi sosial, persepsi keamanan, dan kontribusi ekonomi.
- 3) Melakukan studi perbandingan dengan kota lain untuk menemukan praktik terbaik dalam pengawasan WNA yang dapat diterapkan secara lebih luas.
- 4) Meneliti pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan WNA untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelaporan antarinstansi.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan WNA, memperkuat pencapaian program kerja Kesbangpol, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis bagi masyarakat lokal maupun WNA.

Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap WNA merupakan bagian integral dari tata kelola keamanan dan pemerintahan daerah yang adaptif terhadap dinamika globalisasi. Kesbangpol sebagai lembaga penggerak koordinasi memiliki peran strategis dalam memastikan agar pengawasan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada pembentukan nilai publik (*public value*). Oleh karena itu, efektivitas pengawasan WNA di masa depan sangat bergantung pada keberanian pemerintah daerah untuk bertransformasi menuju birokrasi yang kolaboratif, responsif, dan berbasis data, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip kinerja organisasi publik menurut Mahsun (2006).

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. 2021. Implementation of Foreigners Supervision at Immigration Offices in Indonesia. *Journal of Administration and International Development*, 3(2), 33–42.
- Amirullah dan Budiyono,H. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. 2015. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakhruddin, G, P. Deputra,A dan Antomarta,A. 2022."Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian dalam Menghadapi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Indonesia." *Journal of Law and Border Protection* 4, no. : 74.
- Fachruddin, Irfan. 2006. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni
- Keban, Y. T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Marpaung, D.P., Pujonggo, S.S., dan Adillah, M.A. 2023. Tata Kelola Kolaboratif Dalam Pengawasan Orang Asing: Analisis Peran Multiaktor di Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan* 1: 42 - 52

- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhtar., Arifin, T., and Sutaryo 2021. Performance Accountability in Indonesian Local Governments: Does Monitoring Really Work?. *International Journal of Business and Society* 22: 1673-1692
- Nujuliyani, S., Tirta, S., Azhari,Y., Widodo,P., Saragih,H., dan Sukendro,A. 2023. Strategi Pemerintah NTB Dalam Mencegah Konflik WNA dan Masyarakat Provinsi NTB Guna Mendukung Keamanan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 : 416–423.
- Pasolong, Herbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prayulianda, Helga Anton & Antikowati. 2019. Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan” 6:1 *Lentera Hukum* 141–150.
- Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama
- Sindiawaty,O, dan Purwant, M. 2020. Kebijakan Tindak Administratif Keimigrasian dan Urgensi Penerapan di Indonesia." *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 2 : 8.
- Siagian, 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Aksara Bumi
- Sinambela, L. 2012. *Kinerja Pegawai (Teori Pengukuran dan Implikasi)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Situmorang, Victor M dan Juhir Jusuf. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat (Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Sukmadi. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Kepemimpinan, Lintas Agama*. Bandung: Humaniora.
- Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sule dan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika..
- Tangkilisan, H.N . 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada.

- Wursanto, Ignatius. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Winardi. 2009. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Sri. (2024, 30 Januari). 2 Juta Lebih Wisatawan Kunjungi Bandar Lampung Sepanjang 2023. Kupastuntas.co. <https://kupastuntas.co/2024/01/30/2-juta-lebih-wisatawan-kunjungi-bandar-lampung-sepanjang-2023>.
- Sri. (2024, 7 Juni). WNA Tinggal di Bandar Lampung Tercatat Ada 10 Orang, Harus Lapor Setiap Bulan. Kupastuntas.co. <https://kupastuntas.co/2024/06/07/wna-tinggal-di-bandar-lampung-tercatat-ada-10-orang-harus-lapor-setiap-bulan>
- Hadiyatna, Dian.(2024, 1 Agustus). Kemenkumham Bandarlampung Amankan 12 WNA Terkait Izin Tinggal. ANTARA News. <https://m.antaranews.com/berita/4231587/kemenkumham-bandarlampung-amankan-12-wna-terkait-izin-tinggal>.
- Rohlita, Melida. (2025,2 Februari). Imigrasi Kelas 1 Bandarlampung Deportasi 1 WNA. Radar Lampung Baca Koran <https://radarlampung.bacakorana.co/read/18424/imigrasi-kelas-1-bandarlampung-deportasi-11-wna>.
- Safaat, Najarudin. 2008. (Thesis). Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana. Universitas Indonesia.Depok
- Putri, Kiki Ariska. 2016. “Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda”. E-journal Ip Fisip Unmul, Vol 4, No 3, 2016: 995-1008. Hal. 6.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung
- Permendagri No. 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah
- Perpres No. 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan
- Undang - undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1